

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi merupakan bagian penting dari pembangunan nasional dan daerah di Indonesia. Daerah yang dimaksud disini dapat berupa Provinsi, Kabupaten atau Kota. Tidak dapat dipungkiri bahwa selain pembangunan fisik dan sosial, pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi masih menjadi tujuan utama dalam penyusunan rencana pembangunan nasional dan daerah. Namun, tujuan pertumbuhan ekonomi berbeda-beda sesuai dengan potensi ekonomi masing-masing daerah. Dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang relatif pesat, diharapkan kesejahteraan masyarakat berangsur-angsur membaik.¹

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah diukur dari bagaimana daerah tersebut mengelola perekonomiannya agar anggaran tersebut dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kebutuhan masyarakat setempat. Secara umum tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan menjamin rakyat dapat menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata. Perbedaan pendapatan daerah atau antar daerah sering terjadi dalam aspek kegiatan ekonomi daerah. Disparitas ini terutama disebabkan oleh perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi

¹ Sjafrizal, *Ekonomi wilayah dan Perkotaan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 88-89.

geografis di berbagai daerah. Akibat perbedaan tersebut, kemampuan daerah untuk memajukan proses pembangunan juga berbeda. Oleh karena itu, tidak heran jika setiap daerah biasanya memiliki daerah maju (*Development Region*) dan daerah tertinggal (*Underdevelopment Region*). Adanya perbedaan antar wilayah mempengaruhi tingkat kesejahteraan sosial antar wilayah. Oleh karena itu, perspektif perbedaan pembangunan antar daerah ini juga mempengaruhi pembentukan kebijakan pembangunan daerah pemerintah daerah.²

Teori pertumbuhan ekonomi awalnya digagas oleh Ricardo dan Malthus yang menganalisis perekonomian Inggris pada pertengahan abad ke-20 sebagai teori tiga gelombang pertumbuhan. Gelombang pertama dilancarkan oleh Harrod pada tahun 1939 dan 1948 serta Domar pada tahun 1947, kemudian gelombang kedua dengan teori pertumbuhan ekonomi neo klasik oleh Slo pada tahun 1956 dan Swan pada pertengahan tahun 1950-an. Selain itu, gelombang ketiga dikemukakan oleh Romer dan Lucas pada tahun 1998, meskipun kedua ekonom klasik ini memiliki sudut pandang yang sangat berbeda dengan Adam Smith yang optimis, Ricardo dan Maltus sebenarnya pesimis. Perbedaan Adam Smith dengan kedua pakar tersebut bermula dari perbedaan pandangan mengenai peran penduduk dalam pembangunan ekonomi.³

² Robinson Tarigan, *Ekonomi Regional*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), h. 85.

³ Aulia Afafun Nisa, Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol. 1 Jilid 2, Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2017, h. 205.

Menurut Setiyawat dan Hamzah (2015), pertumbuhan ekonomi secara umum dapat diartikan sebagai berkembangnya kegiatan ekonomi yang mengarah pada peningkatan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat dan peningkatan kekayaan masyarakat.⁴ Dalam prakteknya pendapat Setiyawat dan Hamzah mengacu pada peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa yang dapat menjadi stimulasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat dikatakan tentang pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan beberapa permasalahan terkait penerapan pengelolaan keuangan di Provinsi Banten. Salah satu permasalahan yang mengemuka adalah terkait pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten yang masih mengalami perlambatan. Berdasarkan laman Badan Pusat Statistik, perekonomian Provinsi Banten mengalami kontraksi sebesar 3,38 persen pada tahun 2020. Keadaan ini sangat melemah dibandingkan tahun 2019 yang saat itu perekonomian Provinsi Banten tumbuh sebesar 5,29 persen. Sementara itu PDRB Banten ADH Berlaku tahun 2020 mencapai 626,44 triliun rupiah, dibandingkan pada tahun sebelumnya mencapai 661,65 triliun rupiah, atau menurun sebesar 5,32 persen.

⁴ Anis Setiyawati dan Ardi Hamzah, Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran : Pendekatan Analisis Jalur, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 4 No. 2, Bangkalan : Universitas Trunojoyo, 2015, h. 214.

Untuk memperjelas data tersebut, berikut Peneliti sajikan data mengenai pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan di 8 Wilayah Kab/Kota Provinsi Banten (Milyar Rupiah)

No.	Daerah	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Kab. Pandeglang	17.871,54	18.941,70	19.705,73	19.600,08	20.115,89
2.	Kab. Lebak	18.698,10	19.767,37	20.830,48	20.646,56	21.277,51
3.	Kab. Tangerang	86.973,68	92.124,60	97.142,20	93.544,93	97.869,38
4.	Kab. Serang	49.164,76	51.774,40	54.349,79	53.286,83	54.844,65
5.	Kota Tangerang	101.274,68	107.267,49	110.592,78	102.942,39	106.413,71
6.	Kota Cilegon	66.425,42	70.409,39	74.249,30	73.596,66	77.162,61
7.	Kota Serang	20.154,16	21.455,25	22.813,10	22.518,20	23.392,75
8.	Kota Tangerang Selatan	52.100,77	55.936,16	60.145,12	59.537,30	62.393,12

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten

Merujuk data pada tabel di atas, terlihat bahwa produk domestik bruto regional yang mewakili pertumbuhan ekonomi setiap daerah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Artinya, delapan kabupaten di Provinsi Banten mempunyai potensi untuk mengembangkan kegiatan perekonomiannya seiring dengan terus meningkatnya pertumbuhannya. Hal tersebut merupakan nilai tambah yang menjadi sisi positif dari pembangunan berkeadilan di Indonesia.

Dana alokasi umum merupakan dana APBN yang dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah guna membiayai kebutuhan daerah sehubungan dengan pelaksanaan desentralisasi. DAU daerah menentukan besar kecilnya defisit anggaran daerah, yaitu selisih antara

kebutuhan daerah (kebutuhan fiskal) dan potensi daerah (kapasitas anggaran). DAU digunakan untuk menutup kesenjangan yang timbul karena kebutuhan daerah melebihi kemungkinan pendapatan daerah. Jumlah DAU ditetapkan paling sedikit 26% dari pendapatan bersih rumah tangga yang ditetapkan dalam APBN.⁵ Dengan mendistribusikan keuntungan berdasarkan produksi daerah, penyaluran dana ke daerah cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan peluang daerah. Dana Alokasi Umum Bagi daerah yang memiliki potensi keuangan tinggi namun kebutuhan keuangan masyarakatnya rendah, menerima alokasi Dana Alokasi Umum yang relatif kecil. Sebaliknya daerah yang potensi fiskalnya rendah namun kebutuhan kebijakan fiskalnya tinggi memperoleh dana alokasi umum yang relatif besar. Tujuannya untuk melihat kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan daerah dalam kaitannya dengan pembangunan daerah yang tercermin dari penerimaan APBD secara umum dikurangi biaya pegawai.

Permasalahan lain yang peneliti temukan dalam temuan penelitiannya adalah pada dana alokasi umum dana di Provinsi Banten, dimana pengelolaan anggaran jenis ini masih disalahartikan. Salah satu permasalahan yang muncul pada Dana Umum adalah dana transfer daerah yang dialokasikan melalui APBN selama ini kurang mampu mendorong pembangunan, seperti

⁵ Irfan Ferdiansyah, Dwi Risma Deviyanti & Salmah Pattisahusiwa, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah", *Jurnal Feb Unmul* Vol. 14 No. 1 (2018) h. 45.

disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sebab, dana tersebut sebagian besar dihabiskan untuk biaya pegawai, bukan biaya modal. Masalahnya, sejauh ini yang terjadi justru sebaliknya. Penelitian *Institute for Development of Business and Finance* (Indef) menunjukkan terdapat korelasi positif antara transfer finance dengan indeks Gini. Artinya, dana transfer daerah justru mendorong selisih belanja. Secara statistik misalnya dana transfer umum mempunyai korelasi positif dengan indeks Gini dengan tingkat signifikansi p-value sebesar 0,02 dan koefisien korelasi sebesar 0,0126. Artinya setiap kenaikan DAU sebesar 1%, disparitas justru meningkat sebesar 0,01. Ekonom dan Peneliti Indef Enny Sri Hartati mengatakan penyebab utama permasalahan ini adalah penggunaan dana yang tidak tepat. Oleh karena itu, menurut Enny, dana transfer umum belum efektif untuk mempercepat pembangunan daerah. DAU yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat malah digunakan untuk mendanai biaya bersama.⁶ Sehingga dapat dikatakan DAU tersebut belum sesuai dengan harapan pemerintah pusat sebagai pihak yang menyalurkan DAU kepada masing-masing pemerintah provinsi. Untuk memperjelas informasi tersebut, peneliti menyajikan informasi mengenai penyaluran dana alokasi umum secara umum di Provinsi Banten pada tabel berikut:

⁶ Tirto.id, *Dana Transfer Umum Ke Daerah Tak Efektif, Pembangunan Mandek?*, Artikel Daring, diakses melalui : <https://tirto.id/dana-transfer-umum-ke-daerah-tak-efektif-pembangunanmandek-dbFG>, diakses pada 2 Maret 2023 (03.32 WIB).

**Tabel 1.2 Dana Alokasi Umum di 8 Wilayah Kab/Kota Provinsi
Banten (Ribu Rupiah)**

No	Daerah	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Kab. Pandeglang	1.164.174.459	1.171.648.878	1.213.995.208	1.107.241.659	1.976.633.547
2.	Kab. Lebak	1.081.077.407	1.086.661.291	1.127.187.626	1.014.388.131	1.844.377.914
3.	Kab. Tangerang	1.175.621.706	1.176.554.274	1.222.971.999	1.107.392.704	2.126.906.818
4.	Kab. Serang	1.070.989.882	1.078.411.345	1.122.244.253	1.030.506.343	1.823.971.363
5.	Kota Tangerang	866.113.340	886.113.340	964.844.367	843.004.535	1.423.035.168
6.	Kota Cilegon	595.338.097	597.861.842	643.891.037	597.547.066	905.820.843
7.	Kota Serang	636.602.678	636.602.678	674.620.421	613.720.963	955.492.819
8.	Kota Tangerang Selatan	572.637.313	571.874.988	609.575.078	558.077.884	1.017.221.383

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten

Mengacu pada tabel data di atas terlihat bahwa jumlah uang penyaluran setiap kabupaten di Provinsi Banten berbeda-beda. Sebab, Dana Alokasi Umum merupakan pendapatan daerah yang berisi dana perimbangan negara yang disalurkan sesuai pembayaran dan kebutuhan masing-masing daerah. Dengan demikian, terdapat perbedaan mendasar dalam nilai yang dihasilkan setiap daerah tergantung pada bagaimana kontribusi daerah tersebut dihitung.

Istilah dana alokasi khusus juga dikenal dalam kegiatan nasional yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintah negara bagian, dan federal. Menurut Direktur Jenderal Perimbangan Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dana alokasi khusus adalah dana dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dan dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan khusus yang menjadi prioritas daerah dan nasional.

Besaran alokasi khusus ditetapkan setiap tahun dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.⁷

Pada saat yang sama, dalam konteks dana alokasi khusus, kami menangani bidang-bidang yang memenuhi kriteria dan kriteria teknis tertentu. Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah APBN untuk membiayai kebutuhan pembangunan daerah. Dalam menentukan kriteria khusus, yang dipertimbangkan adalah ketentuan hukum, khususnya ketentuan yang mengatur kekhususan wilayah dan kepulauan, kawasan perbatasan dengan negara lain, kawasan tertinggal atau terpencil, kawasan banjir dan longsor, serta kawasan yang menjadi bagiannya. bidang ketahanan pangan. Kementerian atau departemen teknis terkait menentukan kriteria teknis dengan indikator yang menggambarkan kondisi sarana dan prasarana pada setiap sektor atau industri yang dibiayai dengan dana alokasi khusus.⁸ Untuk memperjelas data tersebut, berikut Peneliti sajikan data mengenai dana alokasi khusus di Provinsi Banten dalam tabel berikut:

⁷ Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Dana Alokasi Khusus, Ebook*, Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2016, h. 2.

⁸ Nia Sukmawati & Ending Naryono, "Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Pemerintah Kota Sukabumi", *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, Vol. 2 No. 1 (April 2021) h. 28-29.

**Tabel 1.3 Dana Alokasi Khusus di 8 Wilayah Kab/Kota
Provinsi Banten (Ribu Rupiah)**

No	Daerah	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Kab. Pandeglang	404.195.942	385.626.887	476.644.077	454.416.135	191.190.092
2.	Kab. Lebak	289.569.030	387.752.106	492.788.445	428.872.944	208.165.401
3.	Kab. Tangerang	347.258.818	381.460.785	363.728.692	380.412.924	843.933.418
4.	Kab. Serang	309.068.179	387.690.020	399.088.131	330.979.482	302.726.715
5.	Kota Tangerang	204.652.774	213.587.477	206.522.599	227.546.008	757.604.694
6.	Kota Cilegon	134.958.287	123.996.175	124.713.796	123.735.681	206.239.938
7.	Kota Serang	166.134.840	146.974.402	156.487.473	156.321.861	222.063.736
8.	Kota Tangerang Selatan	127.768.036	141.157.635	143.290.791	155.949.928	701.185.247

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten

Berdasarkan keterangan pada tabel dana khusus alokasi yang diberikan kepada masing-masing pemerintah Provinsi, nilainya berbeda-beda. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari kenyataan bahwa setiap pemerintah Provinsi harus menerima kebutuhan untuk membiayai kegiatan nasionalnya dengan baik. Oleh karena itu, dana alokasi umum tiap pemerintah Provinsi bersifat variabel.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah jumlah pendapatan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber perekonomian asli daerah yang diukur dengan besaran sasaran PAD setiap kabupaten/kota pada setiap tahun anggaran. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan PAD lainnya yang sah. Untuk memaksimalkan hasilnya,

potensi daerah harus dipacu sehingga hasilnya dapat maksimal.⁹ Pendapatan Asli Daerah bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai wujud desentralisasi. Pendapatan asli daerah dapat dijadikan sebagai indikator penilaian tingkat kemandirian daerah dalam mengelola perekonomian daerahnya. Semakin tinggi rasio pendapatan awal daerah terhadap total pendapatan maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian daerah.

Selain beberapa permasalahan terkait pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, Pemprov Banten punya prestasi lain yakni dari sisi pendapatan asli daerah. Capaian realisasi PAD tahun 2021 sebesar Rp15.672,61 miliar, meningkat 14,83 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2020. Komponen PAD Daerah Banten adalah penerimaan pajak daerah (83,03 persen), penerimaan retribusi daerah (1,96 persen), pendapatan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (1,15 persen), dan PAD lain yang sah (13,87 persen). Sumbangan PAD terbesar di wilayah Banten adalah pajak daerah sebesar Rp13.011,40 miliar, dimana 68,97 persen diantaranya adalah pajak kendaraan bermotor (Rp2.954,07 miliar), BPHTB (Rp2.437,29 miliar), pajak kepemilikan kendaraan bermotor (Rp1.970,06 miliar) dan PBB (Rp1.612,21 miliar). Untuk memperjelas informasi tersebut,

⁹ Bayu Purnomo, I Ketut Kirya & Gede Putu Agus Jana Susila, "Analisis Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Buleleng", *Bisma: Jurnal Manajemen*, Vol. 4 No. 2 (November 2018) h. 96.

berikut peneliti sajikan data pendapatan penduduk lokal provinsi Banten pada tabel berikut:

**Tabel 1.4 Pendapatan Asli Daerah di 8 Wilayah Kab/Kota
Provinsi Banten (Ribu Rupiah)**

No	Daerah	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Kab. Pandeglang	387.100.585	196.996.807	218.326.858	189.186.453	196.060.818
2.	Kab. Lebak	467.474.538	349.363.427	334.722.737	377.504.404	385.144.019
3.	Kab. Tangerang	2.786.647.280	2.872.568.513	2.812.933.125	2.465.364.760	2.869.928.724
4.	Kab. Serang	815.399.914	697.085.200	707.865.883	701.215.211	791.086.614
5.	Kota Tangerang	1.991.898.969	1.864.385.585	2.027.112.806	1.649.002.723	1.869.216.636
6.	Kota Cilegon	652.084.326	578.335.346	634.798.056	717.400.616	630.935.132
7.	Kota Serang	232.458.208	164.218.549	190.029.710	180.263.229	206.238.435
8.	Kota Tangerang Selatan	1.622.004.639	1 621 710,653	1.817.505.710	1.538.705.693	1.713.722.416

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten

Berdasarkan teori-teori di atas dapat disimpulkan bahwa Dana alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang bertujuan untuk membantu pertumbuhan ekonomi melalui pelayanan dasar masyarakat dengan tujuan mencapai pemerataan ekonomi antar daerah. pembiayaan kebutuhan daerah dalam kaitannya dengan pelaksanaan. DAU adalah *Block Grant*, yaitu. dukungan yang cukup fleksibel yang juga bertindak sebagai dukungan pemerataan, yaitu. menetralsir ketimpangan ekonomi akibat dana pembagian keuntungan yang diterima daerah. Sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian daerah.

Menurut Halim (2014:16), “Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu membiayai kegiatan tertentu sesuai dengan prioritas daerah dan nasional”. Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) menurut Bahar (2009:156) yaitu: Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membiayai kegiatan khusus yang bersifat daerah dan sejalan dengan. dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan pelayanan teknis dasar dan infrastruktur masyarakat yang belum mencapai standar tertentu, atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dana alokasi khusus adalah untuk membantu daerah membiayai kebutuhan pelayanan dan infrastruktur masyarakat, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pembangunan infrastruktur masyarakat, dalam rangka meningkatkan pelayanan daerah. pembangunan dapat dipercepat dan dicapai. tujuan prioritas nasional dengan tersedianya pelayanan sarana dan prasarana, pembangunan infrastruktur kemasyarakatan dan kemasyarakatan dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian daerah itu sendiri.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Halim (2014:16), yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diterima daerah,

yang dipunggut menurut peraturan daerah menurut peraturan yang dipunggut dengan undang-undang (Pasal 1, 18). Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah tersendiri, dan pendapatan lain yang sah (Pasal 6 ayat 1).

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah jumlah pendapatan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber perekonomian asli daerah. Pendapatan asli daerah dibagi menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan tersendiri milik daerah, dan PAD lain yang sah. Dari hasil pendapatan asli daerah tersebut terdapat konsistensi bahwa pendapatan awal daerah dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurut Mafahiri dan Soelistiyo dalam Helena Louise Panggabean dan Danarti Hariani, hal ini menunjukkan bahwa ketika dana alokasi umum dan dana alokasi khusus meningkat maka akan memberikan efek peningkat pertumbuhan dan sebaliknya ketika dana alokasi umum dan tunjangan khusus menurun. Dana tersebut juga terkena dampak perlambatan ekonomi.¹⁰

Brata en Ni Wayan Ratna Dewi IDGD Suputra mencatat, terdapat komponen pendapatan daerah yang memberikan dampak positif signifikan

¹⁰ Helena Louise Penggabean dan Danarti Hariani, "Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kemiskinan dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Intervening tahun 2015-2019". *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, Vol 6, No. 2, (2022) Universitas Muhammad Tamrin, h. 2.

terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yaitu PAD. Peningkatan PAD dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian daerah, namun tidak menutup kemungkinan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Khusus (DAK) juga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, karena nilai DAU dan DAK biasanya lebih besar dibandingkan dengan nilai PAD kontribusi dari PAD. Tambunan juga mencatat, sumber belanja daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), ketika PAD meningkat maka instrumen negara meningkat dan tingkat kemandirian daerah pun meningkat, sehingga pemerintah berinisiatif untuk menggali dan meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi daerah.¹¹

Hasil penelitian Made Ari Juniawan dan Ni Putu Santi Suryanti mengatakan pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, DAU berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, DAK berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi berbeda dengan Aulia Afafu Nisa. Pendapatan asli daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dana umum berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, berbeda dengan penelitian PAD yang dikemukakan Pungky Siswiyant, dan DAU berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan DAK mempunyai dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, berbeda dengan penelitian Gordianus Dedi,

¹¹ Ni Wayan Ratna Dewi dan IDGD Suputra, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi," *E-Jurnal Akuntansi* Vol 18, no. 3 (2017) Universitas Udayana, h. 3.

pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus serta secara parsial dan simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja modal dan pertumbuhan ekonomi, berbeda dengan penelitian ahli Anis Setiyawati dan Ardi Hamzah Semua variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap masing-masing variabel dependen sesuai dengan analisis jalur masing-masing variabel. Berbeda dengan penelitian Putri yang menemukan bahwa pendapatan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan dana alokasi secara umum tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. dampaknya terhadap pertumbuhan. ekonomi, berbeda dengan penelitian Dewi dan Suputra yang menemukan bahwa apropriasi umum tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, berbeda dengan penelitian Manek dan Badrudin, Ernita dkk. Dari penelitian Metta Mahen dan Maryono yang menyatakan bahwa dana khusus tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, berbeda dengan penelitian Metta Mahen dan Maryono yang menemukan bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. DAU dan DAK tidak berpengaruh terhadap biaya modal. PAD mempunyai dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. DAU dan DAK tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, namun belanja modal mempunyai pengaruh negatif

yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. DAU mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal.¹²

Secara khusus, pembangunan ekonomi negara tidak selalu merata, perbedaan regional seringkali menjadi masalah utama. Beberapa daerah mencapai pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat, sedangkan daerah lainnya mengalami pertumbuhan yang lambat. Pertumbuhan ekonomi yang cepat dan tepat merupakan dambaan setiap daerah. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang pesat dan pemerataan pendapatan berarti secara tidak langsung mengurangi kemiskinan. Dalam mengatasi penanggulangan kemiskinan, pemerintah wajib memikirkan berbagai langkah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran. Dalam hal ini pendapatan dan belanja daerah dapat dijadikan alat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran dan mengatasi kemiskinan. Pendapatan daerah tersebut meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), sedangkan Belanja Daerah meliputi Belanja Pembangunan.

Provinsi Banten terdiri dari empat wilayah administratif yaitu Pandeglang, Lebak, Tangerang dan Serang. Serta empat kota yakni Tangerang, Serang, Cilegon dan Tangerang Selatan. Secara geografis,

¹² Manek dan Badrudin, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Nusa Tenggara Timur", *Jurnal Telaah Bisnis*, Vol 17, No.2, (2016), h.81-98.

Provinsi Banten terletak di bagian barat Pulau Jawa dan berjarak kurang lebih 90 km dari DKI Jakarta, dengan luas 0.662,92 km² atau sekitar 0,51 persen dari luas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Banten memiliki jumlah penduduk sebanyak 12.061.475 jiwa pada tahun 2021, yang terdiri dari 6.147.144 laki-laki dan 5.914.331 perempuan.¹³

Perekonomian Provinsi Banten di empat kabupaten/kota administratif yaitu. Cilegon, Serang, Tangerang, dan Lebak tumbuh setiap tahun. Sementara itu, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus di Kabupaten/Kota Provinsi Banten mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya. Anggaran adalah laporan keuangan proyeksi kerja yang akan dicapai selama periode waktu tertentu. Dalam organisasi sektor publik, anggaran merupakan alat pelaporan dalam pengelolaan keuangan publik dan pelaksanaan program yang dibiayai oleh dana negara. Penganggaran merupakan kegiatan pemerintah yang penting dan bersifat umum. Setiap pemerintah harus memenuhi tugas penganggaran dalam pelaksanaan kegiatannya dan konsumsi pendapatan. Akuntabilitas adalah dasar dari konsep anggaran yang disetujui. Fungsi-fungsi seperti audit reguler, hukum, anggaran, dan keuangan konsolidasi adalah alat penting untuk menjaga pelaporan keuangan dari eksekutif ke legislatif.

¹³ Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, *Data Series Subyek Kependudukan 2019*.

Ada 4 variabel untuk menghitung atau mengukur pertumbuhan ekonomi yaitu dana umum, dana khusus, pendapatan utama daerah dan pertumbuhan ekonomi. Dana alokasi umum adalah transfer uang dari pusat ke daerah dalam bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan pembangunan lainnya. DAK atau dana alokasi khusus merupakan salah satu dana perimbangan yang merupakan bagian dari sumber pendapatan daerah. Sedangkan pendapatan utama daerah adalah pendapatan yang diterima daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, keuntungan perusahaan, dan urusan hukum lainnya. Dana alokasi umum memiliki sifat yang disebut blok pendukung, yaitu pemanfaatannya dialihkan menjadi pemanfaatan daerah sesuai dengan prioritas daerah dan kebutuhan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah. peraturan tambahan tentang alokasi khusus diatur dengan keputusan pemerintah. Dana Alokasi Khusus (DAK) digunakan untuk membiayai belanja modal jangka panjang untuk akuisisi dan/atau peningkatan infrastruktur dan fasilitas fisik.¹⁴

Dalam Undang-Undang No. 33 tahun 2004 perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proposional, demokratis, transparan dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah, serta besaran

¹⁴ Andri Gustaf Eka Saputera dan Pandoyo. Pengaruh DAU, PAD, DAK Terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Pada Provinsi Jawa Tengah, *Jurnal Ekbank*/Vol. 3 No. 2 (2020), h. 19.

pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dalam Undang-Undang tersebut ditegaskan pula bahwa pelaksanaan kewenangan pemerintah, pemerintah pusat akan mentransferkan dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana perimbangan tersebut meliputi dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan dana bagi hasil (DBH). Selain dana perimbangan tersebut pemerintah daerah juga memiliki sumber pendapatan asli daerah (PAD), pinjaman daerah maupun lain-lain penerimaan yang sah.

Pemerintah daerah yang berhasil menjalankan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat tidak dapat dilepaskan dari keberhasilan mengelola APBD secara efektif dan efisien. Sebaliknya, pengelolaan APBD yang buruk dapat menghambat kinerja pemerintah daerah dalam peningkatan pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat. Persoalan yang muncul adalah saat pemda dihadapkan pada jumlah belanja yang kecil tetapi harus menanggung kebutuhan yang besar. Sementara pada saat bersamaan pemda kurang memiliki kreativitas mengelola APBD, sehingga pemerintah pada jenjang di atasnya (pemptov atau pusat) tidak optimal dalam mengelola APBD.

Pemerintah pusat berharap pemerintah daerah tidak lagi bergantung kepada APBD karena akan menghambat proses pembangunan infrastruktur. Pemerintah daerah harus melakukan inovasi untuk membangun daerahnya.

Inovasi tersebut nantinya membawa perubahan untuk daerah dan menghasilkan investasi untuk modal pembangunan daerah tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang topik tersebut **“pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) provinsi Banten”**.

B. Identifikasi Masalah

Dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka menjadi identifikasi masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi di wilayah Provinsi Banten mengalami perlambatan dimana pada tahun 2020 tercermin dari PDRB yang turun sebesar 3,38%, dibandingkan tahun 2019 tumbuh sebesar 5,29%, serta lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi secara nasional yang tumbuh sebesar 5,32%;
2. Kondisi perekonomian di wilayah Provinsi Banten pada tahun 2020 ini lebih melambat dibandingkan 2019;
3. Selama ini DAU lebih banyak digunakan untuk belanja modal yakni gaji pegawai yang notabe tidak efektif dalam upaya mensukseskan pembangunan nasional;
4. Adanya ketimpangan pengeluaran DAU dimana setiap 1 persen kenaikan DAU, ketimpangan justru akan melebar sebesar 0,01 persen;

5. Pemerintah Provinsi Banten mengalami pencapaian pendapatan ditahun 2021, hal tersebut adanya komponen PAD di wilayah Banten yang dimana yaitu pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Di satu sisi juga ada kontribusi penyumbang PAD terbesar di wilayah Banten yang berasal dari pajak daerah, pajak kendaraan bermotor, BPHTB, pajak bea balik nama kendaraan bermotor dan PBB.

C. Batasan Masalah

Tujuan dari pembatasan masalah ini adalah agar penelitian tetap terfokus pada masalah inti yang ada dan permasalahannya, sehingga penelitian selanjutnya tidak meluas atau menyimpang dari tujuannya. sehingga peneliti ini hanya terbatas pada persoalan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) Provinsi Banten dengan menggunakan data periode 2017-2021.

D. Perumusan Masalah

Untuk memudahkan kajian pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan

Ekonomi (PDRB) wilayah administratif dan kota di Provinsi Banten, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) di Provinsi Banten secara parsial?
2. Bagaimana pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) di Provinsi Banten secara simultan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis sengaja melakukan penelitian ini.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dana alokasi umum, dana alokasi khusus, pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) di Provinsi Banten secara parsial.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dana alokasi umum, dana alokasi khusus, pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) di Provinsi Banten secara simultan.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang peneliti harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Melalui kajian ini dapat memberikan wawasan atau informasi yang komprehensif tentang hubungan antara DAU, DAK, PAD dan pertumbuhan ekonomi. Serta kesempatan untuk menerapkan ilmu teori yang diperoleh di perkuliahan di berbagai mata pelajaran dalam kehidupan kerja dan kehidupan sehari-hari.

2. Bagi praktisi lembaga keuangan

Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas, khususnya para pelaku lembaga keuangan atau pihak terkait, tentang peran dan kebijakan yang telah dirumuskan, yang diharapkan dapat berkembang ke arah yang lebih baik. dalam kehidupan bisnis.

3. Bagi perguruan tinggi

Kajian ini dapat menjadi sumber, bahan referensi bagi generasi muda cendekiawan dan pemikiran bagi Jurusan Ekonomi Islam Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk tujuan penelitian ini, pembahasan dibagi menjadi lima bab yang berisi pokok-pokok pikiran, yang kemudian dibagi lagi menjadi sub-bab, sehingga menjadi satu kesatuan utuh yang menjelaskan gagasan tersebut. Sistem penulisan berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama ini meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, alokasi umum, dana alokasi khusus, studi sebelumnya dan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ketiga membahas tentang waktu dan tempat penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab keempat berisi tentang gambaran umum objek penelitian, analisis hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab keempat berisi tentang gambaran umum objek penelitian, analisis hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.